
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BERPIKIR KRITIS UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TENTANG KORUPSI

Setyo Pambudi^{a,1*}

^aPendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

¹pambudityo29@gmail.com ;

Naskah diterima: 14-09-2026, direvisi: 20-09-2026, disetujui: 30-09-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter dan berpikir kritis untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang korupsi, peran interaksi sosial dan pembelajaran di sekolah, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya di SMP Negeri 3 Tangerang Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru PPKn, dan enam peserta didik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan instrumen berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter dan berpikir kritis telah diimplementasikan melalui pembelajaran, pembiasaan, dan budaya sekolah yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas. Interaksi antara guru dan peserta didik mendukung terbentuknya pemahaman tentang korupsi, sementara keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komitmen sekolah, peran guru, budaya sekolah, dan dukungan orang tua. Adapun kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu pembelajaran, perbedaan karakteristik peserta didik, serta pengaruh lingkungan. Secara keseluruhan, implementasi pendidikan karakter dan berpikir kritis memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman siswa tentang korupsi.

Kata-kata kunci: Pendidikan Karakter 1; Berpikir Kritis 2; Pemahaman Korupsi 3

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap negara, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara serta mengikis nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga perlu dilakukan melalui pendidikan sebagai langkah preventif sejak dini. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang memiliki nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar penting dalam membangun sikap antikorupsi pada peserta didik.

Pendidikan karakter menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dalam diri peserta didik. Pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pengetahuan mengenai baik dan buruk, tetapi juga diarahkan agar peserta didik mampu memahami, menghayati, dan menerapkan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pencegahan korupsi, pendidikan karakter dapat diwujudkan melalui pembiasaan perilaku jujur, bertanggung jawab, disiplin, berintegritas, serta menghargai hak orang lain. Selain itu, pengembangan kemampuan berpikir kritis menjadi penting agar peserta didik tidak hanya mengetahui pengertian korupsi, tetapi mampu menganalisis berbagai bentuk perilaku koruptif, memahami dampaknya, mempertimbangkan alasan dan akibat suatu tindakan, serta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang logis dan etis.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, pengembangan karakter dan kemampuan berpikir kritis memiliki posisi yang penting karena peserta didik berada pada fase perkembangan moral dan intelektual. Pada tahap ini, peserta didik mulai mengembangkan kemampuan berpikir reflektif, memahami berbagai persoalan sosial, dan membentuk pertimbangan mengenai nilai benar dan salah. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang dipadukan dengan kemampuan berpikir kritis dapat membantu peserta didik memahami persoalan korupsi secara lebih luas, tidak hanya sebagai tindakan mengambil uang negara, tetapi juga sebagai penyalahgunaan kepercayaan, kewenangan, atau hak orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pemahaman tersebut dapat dikembangkan dengan menghubungkan persoalan korupsi dengan pengalaman yang dekat dengan kehidupan peserta didik, seperti menyontek, memanipulasi uang kas, mengambil uang kembalian tanpa izin, atau memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur.

Kondisi tersebut menjadi relevan dengan keadaan di SMP Negeri 3 Tangerang Selatan. Berdasarkan kunjungan awal penelitian, sekolah telah mengintegrasikan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam proses pembelajaran. Pengembangan kemampuan berpikir siswa juga dilakukan melalui pertanyaan pemantik, diskusi kelompok, dan penugasan proyek seperti pembuatan poster antikorupsi. Namun, proses pembelajaran masih cenderung didominasi metode ceramah sehingga partisipasi siswa belum sepenuhnya merata. Pemahaman sebagian siswa mengenai korupsi juga masih terbatas pada pengertian umum sebagai pengambilan uang negara untuk kepentingan pribadi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pembelajaran yang lebih partisipatif, kontekstual, dan mampu mendorong siswa untuk menganalisis persoalan korupsi berdasarkan pengalaman kehidupan sehari-hari.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas keterkaitan pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi dengan pemahaman serta pembentukan sikap peserta didik. Calista (2024) menunjukkan bahwa program pendidikan karakter antikorupsi di sekolah menengah dapat

meningkatkan pemahaman siswa mengenai korupsi sekaligus memperkuat kejujuran dan integritas. Penelitian Murdiono (2016) menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di tingkat SMP dapat membantu siswa memahami nilai kejujuran dan membentuk sikap menolak perilaku koruptif. Sementara itu, Amelya et al. (2023) menunjukkan bahwa penguatan nilai pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah berhubungan dengan meningkatnya kesadaran moral dan etika siswa terhadap praktik korupsi serta mendorong mereka untuk bertindak secara etis.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu yang dikaji dalam skripsi ini masih lebih banyak membahas pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi secara umum. Kajian yang secara khusus melihat implementasi pendidikan karakter yang dikombinasikan dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam membentuk pemahaman siswa tentang korupsi masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan melihat bagaimana nilai karakter diterapkan dalam pembelajaran dan budaya sekolah, bagaimana interaksi sosial serta proses pembelajaran membantu siswa memahami korupsi, serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat pemahaman siswa dari aspek pengetahuan mengenai definisi korupsi, tetapi juga melihat kemampuan siswa dalam mengenali bentuk perilaku koruptif, memahami dampaknya, menganalisis kasus, serta menghubungkannya dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dibatasi pada implementasi pendidikan karakter dan kemampuan berpikir kritis dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang korupsi di SMP Negeri 3 Tangerang Selatan. Pembatasan penelitian mencakup tiga aspek utama, yaitu pelaksanaan pendidikan karakter dan pengembangan berpikir kritis dalam proses pembelajaran, proses interaksi sosial dan pembelajaran yang berperan dalam membentuk pemahaman siswa mengenai korupsi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga peningkatan pemahaman siswa dipahami berdasarkan pengalaman, pandangan, kemampuan siswa dalam mengenali perilaku koruptif, serta proses pembelajaran dan interaksi yang berlangsung di lingkungan sekolah, bukan melalui pengukuran eksperimen atau perbandingan nilai secara kuantitatif. Rumusan masalah penelitian ini meliputi bagaimana implementasi pendidikan karakter dan berpikir kritis dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang korupsi, bagaimana proses interaksi sosial dan pembelajaran berperan dalam meningkatkan pemahaman tersebut, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya di SMP Negeri 3 Tangerang Selatan.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter dan berpikir kritis dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang korupsi di SMP Negeri 3 Tangerang Selatan, mengetahui peran proses interaksi sosial dan pembelajaran di sekolah dalam membentuk pemahaman siswa tentang korupsi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pendidikan karakter dan berpikir kritis tersebut.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi, khususnya mengenai keterkaitan pendidikan karakter dengan pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam membentuk pemahaman siswa terhadap persoalan korupsi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peserta didik dalam mengembangkan pemahaman dan sikap antikorupsi, bagi guru sebagai bahan refleksi dalam mengembangkan pembelajaran yang mendorong kejujuran, tanggung jawab, integritas, berpikir kritis, dan berpikir kreatif, serta bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat

budaya sekolah dan program pendidikan karakter yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pendidikan karakter, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Tangerang Selatan yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 1, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2026 yang meliputi kegiatan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kesesuaian karakteristik sekolah dengan fokus penelitian, yaitu implementasi pendidikan karakter dan berpikir kritis dalam pembelajaran serta pemahaman siswa tentang korupsi. Pemilihan lokasi yang relevan dengan permasalahan penelitian diperlukan agar penelitian dapat memperoleh data yang valid dan mendalam serta menggambarkan fenomena secara nyata dan alami.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai implementasi pendidikan karakter dan berpikir kritis dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang korupsi. Penelitian tidak berorientasi pada pengukuran kuantitatif atau pengujian hubungan antarvariabel, tetapi berfokus pada penggalian makna, proses, pengalaman, dan dinamika pendidikan dalam konteks alami. Hal ini sejalan dengan Creswell (2018) yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti memahami pandangan, sikap, serta interpretasi subjek penelitian secara holistik dan kontekstual.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang terlibat dan memiliki pengetahuan mengenai fokus penelitian, yaitu kepala sekolah, guru PPKn, dan enam peserta didik. Pemilihan informan dilakukan secara purposif karena mereka dianggap memiliki keterlibatan dan pengalaman langsung terhadap fenomena yang diteliti. Data penelitian dalam pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan berupa kata-kata, tindakan, serta dokumen, bukan angka atau data statistik. Sementara itu, data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang berasal dari dokumen sekolah, seperti kurikulum, perangkat pembelajaran, modul ajar, tata tertib sekolah, program pendidikan karakter, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai human instrument. Peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, pengamat kondisi lapangan, penganalisis data, serta penafsir hasil penelitian. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam memahami makna dan konteks fenomena secara mendalam (Creswell, 2014). Untuk mendukung proses penelitian, digunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari kepala sekolah, guru PPKn, dan peserta didik mengenai implementasi pendidikan karakter dan berpikir kritis serta pemahaman siswa tentang korupsi. Pedoman observasi digunakan untuk mengamati proses pembelajaran, aktivitas siswa, interaksi guru dan siswa, serta penerapan nilai kejujuran, tanggung

jawab, disiplin, dan integritas. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi melalui berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dalam konteks alami dengan menekankan pemahaman terhadap makna dan proses yang dialami oleh partisipan penelitian (Creswell, 2014). Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai proses pembelajaran, aktivitas siswa, interaksi antara guru dan siswa, serta penerapan nilai karakter dalam lingkungan sekolah. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan pemahaman kepala sekolah, guru PPKn, dan peserta didik mengenai pendidikan karakter, berpikir kritis, dan pemahaman tentang korupsi. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa profil sekolah, visi dan misi, perangkat pembelajaran, modul ajar, program pendidikan karakter, dan dokumentasi kegiatan pembelajaran. Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data penelitian.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah, guru, dan peserta didik, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian juga menggunakan member check untuk mengonfirmasi kembali informasi atau temuan sementara kepada subjek penelitian. Penggunaan teknik tersebut dimaksudkan untuk memastikan konsistensi informasi serta meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk mempermudah peneliti memahami pola, hubungan, dan makna yang terkandung dalam data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menafsirkan makna data berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data, kemudian memeriksa kembali kesimpulan melalui perbandingan informasi dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga diperoleh temuan yang mendalam, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter dan berpikir kritis di SMP Negeri 3 Tangerang Selatan telah dilaksanakan secara terintegrasi melalui proses pembelajaran, budaya sekolah, pembiasaan, dan keteladanan guru. Pendidikan karakter tidak hanya diberikan dalam bentuk penyampaian materi, tetapi diterapkan melalui pembiasaan disiplin, kejujuran, tanggung jawab, integritas, toleransi, kerja sama, dan kepedulian. Kepala sekolah menjelaskan bahwa pembiasaan dilakukan sejak siswa datang ke sekolah, kegiatan keagamaan, upacara, kegiatan literasi dan numerasi, serta melalui pembelajaran pada berbagai mata pelajaran. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas juga telah diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran sehingga pendidikan karakter tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku peserta didik.

Implementasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter di sekolah berlangsung sebagai proses yang berkelanjutan. Nilai karakter tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi

dibentuk melalui pengalaman dan kebiasaan yang dilakukan siswa dalam kehidupan sekolah. Kondisi tersebut sejalan dengan teori Lickona (2022) yang menempatkan pendidikan karakter pada keterkaitan antara moral knowing, moral feeling, dan moral action. Siswa tidak cukup hanya mengetahui bahwa kejujuran dan tanggung jawab merupakan nilai yang baik, tetapi perlu membiasakan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Temuan penelitian juga memperkuat pandangan Berkowitz dan Bier bahwa keberhasilan pendidikan karakter dipengaruhi oleh keterpaduan kurikulum, budaya sekolah, kepemimpinan, serta keterlibatan warga sekolah. Dengan demikian, pendidikan karakter di SMP Negeri 3 Tangerang Selatan dapat dipahami sebagai budaya yang dibangun secara bersama, bukan hanya sebagai materi pembelajaran tertentu.

Dalam kaitannya dengan pemahaman siswa tentang korupsi, penelitian menemukan bahwa sebagian besar peserta didik telah mampu menjelaskan korupsi sebagai tindakan yang merugikan pihak lain melalui penyalahgunaan jabatan, kepercayaan, atau hak untuk memperoleh keuntungan pribadi. Salah satu siswa, misalnya, memahami korupsi sebagai tindakan mengambil hak orang lain. Pemahaman tersebut berkembang meskipun sebagian siswa menyatakan belum pernah memperoleh materi khusus mengenai korupsi. Mereka memperoleh pengetahuan mengenai korupsi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila, diskusi, contoh dari kehidupan sehari-hari, media sosial, serta pemberitaan mengenai kasus korupsi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang korupsi tidak semata-mata terbentuk melalui pembelajaran yang secara khusus membahas korupsi. Pemahaman dapat berkembang ketika nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas dihubungkan dengan pengalaman nyata siswa. Siswa bahkan mampu mengidentifikasi perilaku sederhana yang memiliki karakteristik koruptif, seperti mengambil uang yang bukan haknya, memanipulasi uang, atau melakukan tindakan tidak jujur untuk memperoleh keuntungan. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan pemahaman dari sekadar mengetahui definisi korupsi menuju kemampuan menghubungkan konsep korupsi dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Temuan tersebut sejalan dengan Mulyasa (2016) yang menekankan pentingnya pendidikan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran untuk membentuk peserta didik yang reflektif dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dikembangkan guru melalui diskusi kelompok, studi kasus, pembahasan isu aktual, pertanyaan pemantik, pemecahan masalah, presentasi, dan refleksi. Dalam kegiatan tersebut, siswa diarahkan untuk menganalisis suatu permasalahan, menemukan penyebab dan akibat, menyampaikan pendapat, memberikan alasan, serta menarik kesimpulan. Beberapa siswa menyampaikan bahwa kegiatan studi kasus membantu mereka memahami suatu permasalahan karena mereka diminta menganalisis kasus, mencari sebab dan akibat, menemukan faktor yang berkaitan, kemudian membuat kesimpulan.

Strategi tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan berpikir kritis tidak dikembangkan hanya dengan memberikan pertanyaan yang memiliki jawaban benar atau salah, tetapi melalui proses yang mengharuskan siswa memberikan alasan terhadap pendapatnya. Temuan ini sesuai dengan Ennis yang memandang berpikir kritis sebagai proses berpikir reflektif dan rasional dalam menentukan apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Temuan juga sejalan dengan Facione (2011) yang menempatkan analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan sebagai bagian penting dari berpikir kritis. Pembelajaran berbasis masalah dan studi kasus memberikan ruang kepada siswa untuk menggunakan kemampuan tersebut ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Sunaryati dkk (2025)

yang menunjukkan bahwa diskusi terbuka dan kegiatan pembelajaran yang memberikan ruang kepada siswa untuk berargumentasi dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis sekaligus memperkuat pendidikan karakter.

Selain berpikir kritis, kegiatan pembelajaran juga memberikan ruang bagi pengembangan kreativitas siswa melalui tugas seperti pembuatan mind map, poster, presentasi, proyek, dan bentuk tugas lainnya. Kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan gagasan melalui cara yang berbeda dan menghasilkan produk berdasarkan pemahaman mereka. Dengan demikian, berpikir kritis dan kreatif dalam penelitian ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi. Berpikir kritis membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi suatu persoalan, sedangkan kreativitas membantu siswa menghasilkan gagasan atau bentuk penyelesaian yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Interaksi sosial dan proses pembelajaran juga ditemukan memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman siswa tentang korupsi. Interaksi antara guru dan siswa berlangsung melalui pertanyaan, diskusi, pemberian kesempatan menyampaikan pendapat, serta pemberian umpan balik. Sementara itu, interaksi antarsiswa berlangsung melalui kerja kelompok dan pertukaran pendapat. Kondisi tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk melihat suatu persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Dalam pembelajaran kelompok, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga memperoleh pengetahuan dari teman melalui proses bertukar pendapat dan menyusun solusi bersama. Temuan ini sejalan dengan Nucci (2017) yang menekankan pentingnya dialog dan refleksi dalam pembentukan karakter, serta Paraniti dkk (2024) yang menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif dapat mendukung perkembangan kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar.

Keberadaan interaksi yang positif menjadi semakin penting karena hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak semua siswa memiliki tingkat keberanian dan kemampuan berpikir kritis yang sama. Sebagian siswa mengalami kesulitan ketika harus menyampaikan pendapat karena takut salah, kurang percaya diri, sulit berkonsentrasi, atau merasa khawatir pendapatnya berbeda dengan teman. Salah satu siswa menyatakan bahwa kesulitan berpikir kritis muncul karena takut berbeda pendapat, sedangkan siswa lain menyampaikan keraguan terhadap jawaban yang diberikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan kognitif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan suasana pembelajaran.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa lingkungan belajar yang aman dan terbuka merupakan bagian penting dalam pengembangan pendidikan karakter dan berpikir kritis. Ketika siswa memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat tanpa takut disalahkan, mereka akan lebih mudah terlibat dalam proses analisis dan refleksi. Oleh karena itu, peran guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang menciptakan suasana pembelajaran yang mendorong keberanian, keterbukaan, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Hal ini memperkuat temuan Nucci bahwa pendidikan karakter memerlukan ruang dialog dan refleksi agar siswa dapat memahami nilai secara lebih rasional dan bermakna.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memiliki kesesuaian sekaligus memberikan pengembangan. Calista (2024) menunjukkan bahwa program pendidikan karakter antikorupsi di sekolah menengah dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang korupsi serta memperkuat kejujuran dan integritas. Murdiono (2016) juga menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn dapat membantu menanamkan karakter kejujuran pada siswa SMP. Sementara itu, Amelya dkk. (2023) menunjukkan bahwa penguatan nilai pendidikan karakter dalam kurikulum dapat meningkatkan

kesadaran moral dan etika siswa terhadap korupsi. Penelitian ini memperkuat penelitian-penelitian tersebut, tetapi menunjukkan bahwa pemahaman antikorupsi dapat dibentuk bukan hanya melalui program khusus pendidikan antikorupsi, melainkan juga melalui integrasi nilai karakter, proses berpikir kritis, interaksi sosial, dan pengalaman belajar sehari-hari.

Hal yang menjadi temuan penting dalam penelitian ini adalah SMP Negeri 3 Tangerang Selatan tidak memiliki mata pelajaran khusus pendidikan antikorupsi, tetapi nilai-nilai antikorupsi telah diterapkan melalui pendidikan karakter dan pembelajaran PPKn. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi dalam konteks penelitian ini bersifat integratif. Siswa tidak selalu diberikan materi korupsi secara khusus, tetapi diarahkan untuk memahami nilai yang menjadi dasar perilaku antikorupsi, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, integritas, dan kepedulian. Pola tersebut sejalan dengan penelitian Isroani dan Zaenullah (2023) yang menempatkan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter melalui integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran.

Faktor pendukung implementasi pendidikan karakter dan berpikir kritis dalam penelitian ini meliputi komitmen sekolah, budaya sekolah yang positif, peran guru, penggunaan strategi pembelajaran aktif, hubungan positif antara guru dan siswa, interaksi antarsiswa, serta dukungan keluarga. Guru memiliki peran penting karena strategi pembelajaran yang digunakan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menganalisis permasalahan, mengevaluasi informasi, menyampaikan argumentasi, dan menghasilkan solusi. Sementara itu, dukungan keluarga membantu memperkuat pembiasaan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian di luar lingkungan sekolah. Temuan ini sejalan dengan Amelya dkk (2023) yang menegaskan pentingnya sinergi sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam keberhasilan pendidikan karakter.

Di sisi lain, penelitian menemukan beberapa hambatan, yaitu rendahnya motivasi dan kepercayaan diri sebagian siswa, perbedaan kemampuan berpikir kritis, perbedaan karakteristik peserta didik, kurangnya dukungan keluarga, pengaruh teknologi dan media sosial, serta keterbatasan waktu pembelajaran. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter tidak dapat hanya dibebankan kepada guru dalam kegiatan pembelajaran. Pendidikan karakter merupakan proses yang membutuhkan lingkungan yang konsisten antara sekolah, keluarga, dan kehidupan sosial siswa. Penggunaan teknologi dan media sosial juga perlu diarahkan agar menjadi sumber informasi yang membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bukan hanya menjadi sumber informasi yang diterima tanpa proses evaluasi.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah dapat mengembangkan pendidikan antikorupsi secara lebih kontekstual dengan mengintegrasikan nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran yang telah berjalan. Guru tidak harus selalu memberikan materi khusus mengenai korupsi, tetapi dapat menggunakan kasus atau situasi kehidupan sehari-hari sebagai bahan diskusi dan analisis. Melalui cara tersebut, siswa dapat memahami bahwa korupsi bukan hanya persoalan pengambilan uang negara, tetapi juga berkaitan dengan penyalahgunaan kepercayaan, ketidakjujuran, pengambilan hak orang lain, dan tindakan yang memberikan keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain. Pembelajaran semacam ini juga dapat mempertemukan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan berpikir dalam satu proses pembelajaran.

Temuan penelitian ini juga memberikan pengembangan terhadap pemahaman teori pendidikan karakter. Berdasarkan hasil penelitian, pendidikan karakter dan berpikir kritis dapat dipahami sebagai proses yang saling berhubungan melalui tiga lingkungan utama, yaitu pembelajaran, budaya sekolah, dan interaksi sosial. Pendidikan karakter menyediakan nilai yang menjadi dasar perilaku, berpikir kritis membantu siswa menilai dan menganalisis suatu persoalan

berdasarkan alasan, sedangkan interaksi sosial memberikan ruang bagi siswa untuk menguji pemikiran melalui dialog dan pertukaran pendapat. Dari temuan tersebut dapat dirumuskan modifikasi konseptual bahwa pemahaman antikorupsi siswa berkembang secara lebih bermakna ketika nilai karakter tidak hanya diketahui, tetapi dipraktikkan dan dianalisis melalui pengalaman belajar serta interaksi sosial.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan siswa sebanyak enam orang sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi dan pengalaman informan dalam konteks SMP Negeri 3 Tangerang Selatan dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan kepada seluruh siswa SMP. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dalam waktu yang relatif terbatas sehingga penelitian lebih banyak menggambarkan kondisi implementasi pada saat penelitian berlangsung. Pemahaman siswa tentang korupsi juga dikaji berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga penelitian belum mengukur perubahan pemahaman siswa secara kuantitatif sebelum dan sesudah suatu intervensi pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas konteks penelitian dengan melibatkan lebih banyak informan atau menggunakan pendekatan lain untuk melihat perkembangan pemahaman siswa secara lebih terukur.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter dan berpikir kritis di SMP Negeri 3 Tangerang Selatan telah memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman siswa mengenai korupsi. Kontribusi tersebut tidak berlangsung melalui pemberian materi korupsi secara khusus, tetapi melalui proses yang lebih luas berupa pembiasaan nilai karakter, pembelajaran kontekstual, diskusi, studi kasus, pemecahan masalah, interaksi sosial, serta keteladanan guru. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketika siswa dibiasakan untuk jujur, bertanggung jawab, disiplin, berintegritas, berani berpendapat, menganalisis masalah, dan mempertimbangkan akibat suatu tindakan, mereka lebih mampu memahami korupsi tidak hanya sebagai konsep hukum, tetapi juga sebagai persoalan moral dan sosial yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi pendidikan karakter dan berpikir kritis untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang korupsi di SMP Negeri 3 Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter telah diimplementasikan secara terintegrasi melalui proses pembelajaran, pembiasaan, budaya sekolah, serta keteladanan guru. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, integritas, kepedulian, dan toleransi tidak hanya disampaikan secara konseptual, tetapi juga dibangun melalui interaksi dan kebiasaan siswa dalam kehidupan sekolah. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi tidak harus ditempatkan sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan budaya sekolah sehingga siswa memperoleh pengalaman yang lebih kontekstual dalam memahami nilai-nilai antikorupsi.

Implementasi pendidikan karakter yang dipadukan dengan pengembangan berpikir kritis juga berkontribusi terhadap pemahaman siswa mengenai korupsi. Pemahaman siswa tidak lagi terbatas pada anggapan bahwa korupsi hanya berkaitan dengan pengambilan atau penyalahgunaan uang negara, tetapi mulai berkembang pada pemahaman bahwa perilaku koruptif dapat berkaitan dengan ketidakjujuran, penyalahgunaan kepercayaan, pengambilan sesuatu yang bukan haknya, manipulasi, serta tindakan lain yang bertentangan dengan nilai integritas. Penggunaan metode

diskusi, studi kasus, pemecahan masalah, presentasi, dan kegiatan berbasis proyek memberikan ruang kepada siswa untuk menganalisis permasalahan, menyampaikan pendapat, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, serta menghubungkan permasalahan korupsi dengan situasi yang dekat dengan kehidupan mereka. Dengan demikian, pendidikan karakter memberikan landasan nilai, sedangkan berpikir kritis memberikan proses penalaran yang membantu siswa memahami alasan mengapa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perilaku yang tidak berintegritas.

Keberhasilan implementasi tersebut didukung oleh komitmen sekolah, budaya sekolah yang positif, peran guru sebagai pendidik sekaligus teladan, penggunaan pembelajaran yang aktif dan kontekstual, serta interaksi positif antara guru dan siswa. Sebaliknya, penelitian juga menemukan beberapa hambatan, seperti keterbatasan waktu pembelajaran, perbedaan kemampuan dan karakteristik siswa, rendahnya motivasi atau kepercayaan diri sebagian siswa, pengaruh lingkungan pergaulan dan keluarga, serta penggunaan teknologi dan media sosial yang tidak selalu dapat dikontrol. Upaya yang dilakukan sekolah dan guru untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui pendekatan individual, penggunaan metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, pemberian kesempatan kepada siswa yang kurang aktif untuk berpartisipasi, variasi strategi pembelajaran, serta komunikasi dengan orang tua. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman siswa tentang korupsi tidak hanya bergantung pada penyampaian materi, tetapi memerlukan sinergi antara pembelajaran, keteladanan, budaya sekolah, interaksi sosial, dan lingkungan pendidikan siswa.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi pada jenjang sekolah menengah pertama perlu diarahkan pada pembentukan karakter sekaligus kemampuan berpikir kritis agar siswa tidak hanya mengetahui pengertian korupsi, tetapi juga mampu mengenali, menganalisis, menilai, dan mengambil sikap terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai integritas. Berdasarkan temuan penelitian, hubungan antara pendidikan karakter dan berpikir kritis dapat dipahami melalui suatu proses yang saling berkaitan, yaitu nilai karakter menjadi dasar moral, berpikir kritis menjadi mekanisme untuk menilai suatu persoalan, sedangkan budaya sekolah dan interaksi sosial menjadi ruang bagi siswa untuk menerapkan nilai tersebut dalam perilaku nyata. Penelitian ini sekaligus memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek dan konteks penelitian yang terbatas pada satu sekolah, sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan pada seluruh sekolah. Selain itu, penelitian belum mengukur perubahan pemahaman siswa secara kuantitatif dan dilakukan dalam rentang waktu penelitian yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak sekolah dan informan, melakukan pengamatan dalam jangka waktu yang lebih panjang, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pendidikan karakter dan berpikir kritis dalam pendidikan antikorupsi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, sekolah disarankan untuk mengembangkan program pendidikan antikorupsi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dengan tetap mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran dan budaya sekolah. Guru juga disarankan untuk memperbanyak penggunaan metode pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif siswa, seperti studi kasus, pemecahan masalah, diskusi, debat, pembelajaran berbasis proyek, serta pengkajian isu-isu aktual yang relevan dengan kehidupan siswa. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama antara sekolah dan orang tua dalam membangun lingkungan yang konsisten dalam menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, termasuk melalui pendampingan terhadap penggunaan teknologi dan media sosial. Dengan adanya kesinambungan antara pendidikan di

sekolah, keteladanan guru, dukungan keluarga, dan lingkungan sosial siswa, pemahaman tentang korupsi diharapkan tidak berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi berkembang menjadi kesadaran moral, kemampuan berpikir kritis, dan perilaku berintegritas dalam kehidupan sehari-hari..

Referensi

- Amelya, N., Dany, M., Rahayu, D., Helmina, M., & Zahra, R. (2023). Penguatan nilai-nilai pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah sebagai strategi upaya pencegahan korupsi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 1005–1012. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8418088>
- Calista, A. (2024). Pengaruh program pendidikan karakter anti korupsi di sekolah menengah. *Sindoro Cendikia Pendidikan*, 7(5).
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Isroani, F., & Zaenullah, Z. (2023). Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter bagi peserta didik. *Jurnal Sustainable*, 6(2), 470–474. <https://doi.org/10.32923/kjimp.v6i2.4135>
- Mulyasa, E. (2016). Improved quality management based learning for preparing the character of graduates in response to globalization era. *International Journal of Education and Research*, 4(11), 385–393.
- Murdiono, M. (2016). Pendidikan anti korupsi terintegrasi dalam pembelajaran PKn untuk menanamkan karakter kejujuran di SMP. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(1). <https://doi.org/10.21831/socia.v13i1.9910>
- Nucci, L. (2017). Character: A multifaceted developmental system. *Journal of Character Education*, 13(1), 1–16. <https://doi.org/10.1108/JCED-12-2017-0001>
- Paraniti, A. A. I., Dina, N. K., Diarta, I. M., & Hermawan, I. M. S. (2024). Membangun keterampilan berpikir kritis dan kemandirian belajar: Akselerasi mewujudkan profil pelajar Pancasila. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 201–208. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.1907>
- Sunaryati, T., Syva, F., Savira, S., & Khasanah, N. (2025). Penguatan pendidikan karakter kreatif dan berpikir kritis pada anak sekolah dasar melalui diskusi terbuka dan debat dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. *ALACRITY: Journal of Education*, 325–337. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v5i1.648>